**KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan ("**Keterbukaan Informasi**") ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Dalam hal terdapat kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, segera konsultasikan dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

**PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
("Perseroan atau "GHON")
Berkedudukan di Jakarta Barat**

Bidang Usaha:

Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, informasi dan komunikasi, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atas mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya.

Kantor Pusat:

APL Tower – Central Park Lt. 19 Unit T-7
Jl. Letjend S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta 11470
Telepon: 021-2527300/021-2527276
Email address: info@gihon-indonesia.com
Website: www.gihon-indonesia.com

Keterbukaan informasi ini disampaikan oleh Perseroan sehubungan dengan rencana atas perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, berupa penambahan kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan baterai bagi menara telekomunikasi.

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh perseroan sehubungan dengan atas rencana perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha terkait pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemasangan sistem instalasi listrik untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

RUPS untuk menyetujui rencana Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 2025
pukul 13.30 - selesai

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2025.

DEFINISI

Kantor Jasa Penilai Publik	berarti badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam menjalankan usaha di bidang penilaian dan jasa-jasa lainnya.
KBLI	berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KJPP MPR	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan yaitu perusahaan jasa penilai yang terdaftar dengan nomor izin usaha 2.09.0070 melalui Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KM.1/2019 yang memiliki pengalaman (<i>track record</i>) penilaian dengan klasifikasi A (Aset) dan B (Bisnis).
OJK	berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Perseroan atau GHON	berarti PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Barat, suatu perusahaan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang—undangan Negara Republik Indonesia.
POJK No. 17/2020	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 15/2020	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha	berarti rencana penambahan kegiatan usaha berupa penyewaan power supply bagi menara telekomunikasi kepada pelanggan perseroan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Studi Kelayakan Bisnis	berarti suatu penugasan Penilaian Profesional yang diberikan oleh Penilai Bisnis berupa pendapat untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek.
Tanggal Penilaian	berarti dalam laporan ini sama pengertiannya dengan Tanggal Studi Kelayakan Bisnis, yaitu tanggal dinyatakan pendapat untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek.
UUP2SK	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845.

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Gihon Telekomunikasi Indonesia bertempat kedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta Notaris NURMIATI, S.H., No. 58 Tanggal 27 April 2001 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) dengan surat keputusan No. C00673.HT.01.01.TH.2001 Tanggal 10 Mei 2001.

Anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 34 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dihadapan ASHOYA RATAM S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 34/2022**”), yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0040996.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0113119.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022`. Berdasarkan Akta no. 34/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui diantaranya: perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, informasi dan komunikasi, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atas mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya. Pada saat ini, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2025 yang dikeluarkan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal per saham		Persentase Suara (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	950.000.000	95.000.000.000	
Tower Bersama Infrastructure	277.337.700	27.733.770.000	50,43%
Rudolf P Nainggolan	198.395.080	19.839.508.000	36,07%
Felix Ariodamar	1.986.090	198.609.000	0,36%
Yoyong	307.500	30.750.000	0,05%
Masyarakat	71.973.630	7.197.363.000	13,09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	55.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	400.000.000	40.000.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 31 Mei 2024 (“**Akta 9/2024**”) yang dibuat di hadapan TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn. yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0211723 tanggal 7 Juni 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0112823.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 7 Juni 2024.

Komisaris Utama : Drs. Kumari AK
Komisaris : Johannes Adi Sasongko
Komisaris Independen : Aria Kanaka

Direktur Utama : Rudolf P Nainggolan
Direktur : Felix Ariodamar
Direktur : Yoyong

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Aria Kanaka
Anggota : Andreas Adoe
Anggota : Juwita Apriliaty

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/Let/ GTI/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Aria Kanaka
Anggota : Drs Kumari AK
Anggota : Johannes Adi Sasongko

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk sebagai sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/BOD/GTI/IX/2019 tanggal 23 September 2019, tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan juga sesuai dengan Peraturan OJK No.35/2014. Pada tanggal keterbukaan informasi sekretaris Perusahaan adalah :

Nama : Yoyong
Alamat Kantor : APL Tower – Central Park Lt. 19 Unit T-7 Jl. Letjend S. Parman Kav. 28,
Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11470

No. Telp : 0818-762-222

Keterangan Mengenai Entitas Anak

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Penyertaan Perseroan	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
							Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1	PT Global Patra Sinertama	Jasa Konstruksi Instalasi Komunikasi	Tangerang Selatan	2023	2018	2018	80%	-

Iktisar Data Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Periode Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan dengan kesimpulan wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00094/2.1315/AU.1/06/1017-1/1/II/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Riki Afrianof, CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian :

	Dalam Ribuan Rupiah	
	Des 2024	Des 2023
Jumlah Aset	1.427.439.424	1.359.147.579
Jumlah Liabilitas	580.628.884	524.102.658
Jumlah Ekuitas	846.810.540	835.044.921

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian:

	Dalam Ribuan Rupiah	
	Des 2024	Des 2023
Pendapatan	211.679.065	203.637.725
Laba Kotor	162.645.245	154.981.092
Laba dari Operasi	141.942.912	137.592.830
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	107.712.978	120.573.086
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	89.629.882	104.582.737
Laba Bersih Tahun Berjalan	86.401.684	100.226.779
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	108.140.619	102.873.879
Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk (nilai penuh)	157	182

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai dasar pertimbangan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan baterai bagi menara telekomunikasi. Sebelum dapat melakukan penambahan kegiatan usaha tersebut, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK No. 17/2020. Penambahan kegiatan usaha tersebut juga dilakukan dalam memenuhi Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang KBLI.

III. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1. KETERANGAN SINGKAT

Riwayat singkat

GHON berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta Notaris Nurmiati, S.H., No. 58 tanggal 27 April 2001 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00673.HT.01.01.TH.2001 tanggal 10 Mei 2001.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta No. 34/2022 tersebut, mengenai hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0040996.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, informasi dan komunikasi, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atas mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya. GHON berkantor pusat di APL Tower – Central Park Lt. 19 Unit T-7, Jl. Letjend S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat 11470.

2. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyewaan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan baterai untuk menara telekomunikasi, Perseroan tidak melakukan penambahan sumber daya manusia internal. Kegiatan operasional dan instalasi unit akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra yang telah memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam pemasangan serta pengelolaan sistem ketenagalistrikan berbasis baterai. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan ini dapat terpenuhi secara efisien tanpa mempengaruhi struktur organisasi maupun beban operasional Perseroan secara signifikan.

3. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha utama Perseroan berfokus pada penyewaan ruang pada lokasi menara telekomunikasi (site) yang digunakan sebagai tempat pemasangan antena dan perangkat pendukung lainnya untuk transmisi sinyal nirkabel. Kerja sama ini dilakukan melalui perjanjian jangka panjang dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel. Selain itu, Perseroan juga menyediakan perangkat akses jaringan seperti *repeater* dan *in-building system* guna mendukung konektivitas telekomunikasi, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi.

Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, manajemen Perseroan seringkali mendapatkan kebutuhan dari pelanggan yang tidak hanya terbatas pada penyewaan menara, tetapi juga mencakup beberapa kebutuhan pendukung atau aksesoris lainnya, seperti penyediaan perangkat power supply, di antaranya berupa baterai dan rectifier, yang disewakan untuk menunjang pengoperasian perangkat milik pelanggan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelanggan dan meningkatnya permintaan terhadap solusi kelistrikan yang efisien dan berkelanjutan, manajemen memandang perlu untuk memberikan dukungan layanan yang semakin komprehensif dan relevan dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Oleh karena itu, dalam rencana bisnis jangka panjangnya, manajemen bermaksud menambah kegiatan usaha Perseroan yang berkaitan dengan penyewaan power supply, khususnya kepada pelanggan eksisting, baik di lokasi menara yang telah ada maupun di menara-menara baru yang akan dikembangkan ke depannya.

Dengan kata lain, Perseroan bermaksud memperluas jasa yang dapat diberikan kepada pelanggan eksisting, sehingga tidak hanya terbatas pada penyewaan ruang menara, tetapi juga mencakup penyediaan sistem kelistrikan yang mendukung operasional perangkat pelanggan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan tren industri telekomunikasi yang mulai mengadopsi sistem kelistrikan berbasis baterai untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada genset berbahan bakar fosil.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud menambah kegiatan usaha berupa:

- a. Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI: 35121); dan
- b. Pemasangan sistem instalasi listrik (KBLI: 43211)

Penambahan kegiatan usaha ini juga merupakan bagian dari strategi diversifikasi dan integrasi layanan yang masih sejalan dengan lini usaha utama Perseroan, serta diyakini dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan meningkatkan daya saing usaha secara berkelanjutan.

4. PENJELASAN TENTANG PENGARUH RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Rencana penambahan kegiatan usaha ini diproyeksikan akan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha Perseroan. Dengan perluasan ruang lingkup layanan yang ditawarkan, diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan usaha serta berdampak pada pertumbuhan aset Perseroan dalam jangka menengah hingga panjang. Implikasi finansial dari inisiatif ini juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham melalui penguatan fundamental dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

IV. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk KJPP MPR, sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi terdaftar dengan nomor izin usaha 2.09.0070 melalui Salinan Keputusan Menteri Keuangan No 440/KM.1/2019 tanggal 12 Agustus 2019 untuk memberikan pendapat atas kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam bentuk penambahan kegiatan usaha Perseroan berupa penyewaan *power supply* yang merupakan bagian dari Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI: 35121); dan Pemasangan sistem instalasi listrik (KBLI: 43211) kepada pelanggan Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dituangkan dalam Laporan Studi Kelayakan Bisnis untuk PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, dengan No. 00010/2.0070-00/BS/06/00168/1/IV/2025 tanggal 22 April 2025 ("Laporan Studi Kelayakan") :

a. Maksud dan Tujuan Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji Objek Studi Kelayakan Bisnis sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi :

- Analisis terhadap kelayakan pasar yang meliputi kondisi pasar, pesaing usaha, dan strategi pemasaran;
- Analisis terhadap kelayakan teknis yang meliputi kapasitas, ketersediaan dan kualitas sumber daya, termasuk bahan baku mentah, pekerja, dan ahli profesional dan proses produksi;
- Analisis terhadap kelayakan pola bisnis yang meliputi keunggulan kompetitif karena keunikan dari pola bisnis, kemampuan pesaing untuk meniru produk, dan kemampuan untuk menciptakan nilai;
- Analisis terhadap kelayakan model manajemen yang meliputi ketersediaan tenaga kerja, manajemen kekayaan intelektual, manajemen risiko, kapasitas dan kemampuan manajemen dan kesesuaian struktur organisasi dan manajemen;
- Analisis terhadap kelayakan keuangan yang meliputi proyeksi laporan keuangan, analisis titik impas, analisis profitabilitas, dan tingkat imbal balik investasi.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

b. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Asumsi – Asumsi Pokok:

- Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan adalah benar;
- Kondisi makro ekonomi maupun industri didasarkan pada kondisi terkini sesuai data APBN tahun berjalan atau tahun yang akan datang disesuaikan dengan Tanggal Studi Kelayakan Bisnis yang telah mengakomodir kondisi terkini terkait Objek Studi Kelayakan Bisnis;
- Perseroan telah memastikan Objek Studi Kelayakan Bisnis tidak sedang tersangkut masalah hukum atau tuntutan hukum dari pihak ketiga;
- Hasil uji kaji terbatas dengan maksud dan tujuan penugasan, sudah dapat memenuhi kebutuhan analisis secara kuantitatif;
- Tidak ada *dispute* pajak dan seluruh kewajiban pajak oleh Perseroan, terkait Objek Studi Kelayakan Bisnis dapat dipenuhi, baik sebagai bagian dari entitas bisnis maupun sebagai entitas bisnis secara keseluruhan;
- Asumsi proyeksi keuangan Objek Studi Kelayakan Bisnis diyakini dapat dipenuhi dan merupakan asumsi yang telah mempertimbangkan risiko dan manfaat bagi Perseroan.

Kesimpulan dalam bentuk kelayakan atau tidaklayakan yang dihasilkan didasarkan pada ketersediaan informasi dan data yang diperoleh dari Perseroan dan data/atau informasi eksternal terkini yang diyakini kebenarannya berdasarkan Tanggal Penilaian yang ditetapkan oleh Perseroan.

c. Kesimpulan / Pendapat atas kelayakan perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan analisis aspek kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan dapat disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha penyewaan power supply (KBLI: 35121 — Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik) dan (KBLI: 43211- Pemasangan Sistem Instalasi Listrik) kepada pelanggan eksisting berpotensi mendapatkan pengembalian lebih tinggi dari WACC Perseroan. Sehingga mempertimbangkan akses dari pangsa pasar yang kuat, pengalaman Grup dalam industri dan potensi tingkat pengembalian Penilai beropini bahwa penambahan kegiatan usaha penyewaan power supply adalah layak.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Persetujuan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha akan dimohonkan kepada para pemegang saham dalam RUPS yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 2 Juni 2025
Waktu : 13.30 WIB – selesai
Tempat : Pondok Indah Golf Course, Pine Room, Golf Gallery Lantai 2
Jl. Metro Pondok Indah, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310

Mata acara yang akan dimohonkan sehubungan dengan rencana transaksi adalah:

"Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha (termasuk pembahasan studi kelayakan bisnis terkait rencana dimaksud) yang akan dilakukan oleh PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, berupa penambahan kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan baterai bagi menara telekomunikasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha."

RUPS akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 32 juncto Pasal 22 ayat (1) butir a POJK No. 17/2020 dan Pasal 42 POJK No. 15/2020. Dengan demikian, untuk mata acara terkait dengan rencana transaksi tersebut diatas, RUPS dapat dilangsungkan untuk membahas mata acara tersebut jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya Yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. Keputusan RUPS untuk mata acara tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara Yang sah yang hadir dalam RUPS.

Apabila kuorum RUPS pertama sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan yang diambil dalam RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 17/2020, dalam hal Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak memperoleh persetujuan RUPS, maka Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui tersebut.

Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS:

1	Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.gihon-indonesia.com	24 April 2025
2	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam	8 Mei 2025
3	Pemanggilan RUPS melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.gihon-indonesia.com	9 Mei 2025
4	Perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.gihon-indonesia.com (Jika ada) 2 hari sebelum RUPS	28 Mei 2025
5	Tanggal Penyelenggaraan RUPS	2 Juni 2025
6	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.gihon-indonesia.com	4 Juni 2025

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary

PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.

APL Tower – Central Park Lt. 19 Unit T-7
Jl. Letjend S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta 11470
Telepon: 021-2527300/021-2527276
Email address: info@gihon-indonesia.com
Website: www.gihon-indonesia.com